



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Vokasi  
Program Studi D4 Administrasi Negara**

Kode Dokumen

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Administrasi Pemerintahan Daerah	6330102057	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=1 P=1 ECTS=3.18	5	4 Juli 2023

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Agus Prastyawan	Prasetyo Isbandono	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.

Model Pembelajaran	Case Study
--------------------	------------

Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>
---------------------------	--

CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
CPL-5	Mampu menguasai konsep kebijakan, tata kelola kepegawaian dan implementasi regulasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan sektor publik.
CPL-9	Mampu menyusun berbagai alternatif solusi di bidang kebijakan, tata kelola kepegawaian dan pembangunan sektor publik dan mengembangkan etika pelayanan publik.
CPL-10	Mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat berinteraksi secara profesional dengan setiap individu, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
---

CPMK - 1	Mampu menunjukkan sikap yang dilandasi nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
CPMK - 2	Mampu menggunakan konsep kebijakan, tata kelola kepegawaian dan implementasi regulasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan sektor publik.
CPMK - 3	Mampu merekomendasikan alternatif solusi di bidang kebijakan, tata kelola kepegawaian dan pembangunan sektor publik dan mengembangkan etika pelayanan publik
CPMK - 4	Mampu menunjukkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat berinteraksi secara profesional dengan setiap individu, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Matrik CPL - CPMK
-------------------

	CPMK	CPL-1	CPL-4	CPL-5	CPL-9	CPL-10
CPMK-1		✓				
CPMK-2				✓		
CPMK-3					✓	
CPMK-4						✓

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)
--

	CPMK	Minggu Ke															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1		✓				✓			✓								
CPMK-2			✓				✓	✓									✓
CPMK-3				✓						✓	✓	✓					
CPMK-4					✓								✓	✓	✓	✓	

**Deskripsi Singkat MK** Mata kuliah mengantar pemahaman mahasiswa akan pengertian Sistem Otonomi, Pengertian Pemerintah Daerah, konsep-konsep yang mendasari pembentukan Pemerintahan Daerah, yaitu sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, local government dan wilayah administrasi, administrasi pemerintahan daerah dan birokrasi lokal, hubungan serta kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, cara penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, koordinasi antar pemerintah daerah, perencanaan keuangan daerah sampai pada pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, hubungan antara kepala daerah dengan DPRD, instansi vertikal pada pemerintah daerah, perencanaan-pelaksanaan-evaluasi kebijakan, fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pada akhirnya sampai pada pengawasan internal-eksternal baik dari sisi politik, masyarakat dan oleh lembaga peradilan.

<b>Pustaka</b>	<p><b>Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Smith, Kevin B. 2014. State and Local Government. SAGE Publica Lions (Asia Pasific)</li> <li>Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</li> <li>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p>
----------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu</li> <li>2. Rosenbloom David H &amp; Kravichuk Robert S 2005 Public Administration Understanding Management Politics and Law in the public Sector Mc Graw Hill</li> <li>3. Smith, Kevin B. 2014. Governing States and Localities. SAGE Publication Ltd</li> </ol>					
<b>Dosen Pengampu</b>		Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Dr. Haryo Kunto Wibisono, S.AP., M.AP. Gading Gamaputra, S.AP., MPA.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian otonomi daerah dan pemerintah daerah	Menjelaskan system otonomi daerah dan dasar pembentukan pemerintah daerah	<b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Kuliah mimbarTanya jawab. Diskusi. 2 X 50		<b>Materi:</b> otonomi daerah dan pemerintah daerah <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan perbedaan perbedaannya sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan</li> <li>2. Menganalisis hak dan kewajiban pemerintah daerah</li> <li>3. Mengidentifikasi aktor birokrasi lokal</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Kuliah mimbarTanya jawab. Diskusi 2 X 50		<b>Materi:</b> Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  <b>Materi:</b> Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan <b>Pustaka:</b> Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan</li> <li>2. Menganalisis hak dan kewajiban pemerintah daerah</li> <li>3. Mengidentifikasi aktor birokrasi lokal</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Kuliah mimbarTanya jawab. Diskusi 2 X 50		<b>Materi:</b> Menganalisis hak dan kewajiban pemerintah daerah <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  <b>Materi:</b> Mengidentifikasi aktor birokrasi lokal <b>Pustaka:</b> Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah</li> <li>2. Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif		Kuliah mimbar/Diskusi/Simulasi 2 x 50	<b>Materi:</b> Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  <b>Materi:</b> Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah <b>Pustaka:</b> Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%

5	Mahasiswa mampu menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah</li> <li>2. Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>		Kuliah mimbar/Diskusi/Simulasi 2 x 50	<p><b>Materi:</b> Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah</p> <p><b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah</p> <p><b>Pustaka:</b> Afiffudin. 2014. <i>Administrasi Pemerintahan Daerah</i>. Graha Ilmu</p>	5%
6	Menganalisis persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan persyaratan penyerahan kewenangan</li> <li>2. Menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan</li> <li>3. Mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja-sama</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Kuliah mimbar/Diskusi/Simulasi 2 x 50		<p><b>Materi:</b> Menjelaskan persyaratan penyerahan kewenangan</p> <p><b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Rosenbloom David H &amp; Kravichuk Robert S 2005 Public Administration Understanding Management Politics and Law in the public Sector Mc Graw Hill</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja-sama</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</i></p>	5%

7	Menganalisis persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan persyaratan penyerahan kewenangan</li> <li>2. Menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan</li> <li>3. Mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja-sama</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Kuliah mimbar/Diskusi/Simulasi 2 x 50		<p><b>Materi:</b> Menjelaskan persyaratan penyerahan kewenangan <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan <b>Pustaka:</b> Rosenbloom David H &amp; Kravichuk Robert S 2005 Public Administration Understanding Management Politics and Law in the public Sector Mc Graw Hill</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja-sama <b>Pustaka:</b> Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</p>	5%
8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungan dengan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut</li> <li>2. Mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil informasi dan analisis data</li> </ol>	rubrik penilaian uts	<p><b>Kriteria:</b> 1. Soal no.1 skor :20 Soal no.2 skor :20 Soal no.3 skor :20 Soal no.4 skor :40 2. kesesuaian dan ketepatan jawaban</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Tes</p>	Tes tertulis 2 x 50		<p><b>Materi:</b> semua materi yang telah diberikan <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	15%

9	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Mengidentifikasi factor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. keaktifan bertanya dan menjawab</li> <li>2. keesuaian dan ketepatan analisis</li> </ol> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	presentasi, diskusi 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mengidentifikasi factor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah <b>Pustaka:</b> Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</p>	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Mengidentifikasi factor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio</p>	presentasi, diskusi 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Mengidentifikasi factor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah <b>Pustaka:</b> Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</p>	5%
11	Menjelaskan peranan masing-masing Lembaga Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan antara hubungan kepala daerah dengan DPRD</li> <li>2. Menganalisis pola hubungan instansi vertikal pada pemerintah daerah</li> <li>3. Mengidentifikasi factor-faktor penghambat pola hubungan tersebut</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	presentasi. diskusi 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Menjelaskan antara hubungan kepala daerah dengan DPRD <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Menganalisis pola hubungan instansi vertikal pada pemerintah daerah <b>Pustaka:</b> Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</p>	5%

12	Mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk kebijakan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan berbagai produk kebijakan, siapa pelaksananya dan mekanisme evaluasi kebijakan tersebut.</li> <li>2. Menganalisis dasar pengambilan kebijakan</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> ketepatan dan kesesuaian analisis pemecahan masalah</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	presentasi - Diskusi 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Menjelaskan berbagai produk kebijakan, siapa pelaksananya dan mekanisme evaluasi kebijakan tersebut.</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Menjelaskan berbagai produk kebijakan, siapa pelaksananya dan mekanisme evaluasi kebijakan tersebut.</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</i></p>	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Pelayanan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah.</li> <li>2. Menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat pengguna pelayanan.</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah mimbarDiskusi Simulasi 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah.</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah.</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu</i></p>	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Pelayanan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah.</li> <li>2. Menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat pengguna pelayanan.</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Kuliah mimbarDiskusi Simulasi 2 X 50		<p><b>Materi:</b> Menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah.</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> Menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah.</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu</i></p>	5%

15	Mahasiswa mampu menjelaskan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	1. Menjelaskan prosedur pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah 2. Menganalisis mekanisme pengawasan oleh masyarakat	<b>Kriteria:</b> keaktifan bertanya dan menjawab <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif		Kuliah mimbar Diskusi Simulasi 2 X 50	<b>Materi:</b> Menjelaskan prosedur pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <b>Materi:</b> Menganalisis mekanisme pengawasan oleh masyarakat <b>Pustaka:</b> Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.	5%
16	evaluasi pertemuan 1-16	Mahasiswa mampu menyajikan best practice pelaksanaan pelayanan publik dalam kerangka pemda	<b>Kriteria:</b> 1. Skor soal no.1 : 20 Skor soal no.2 : 20 Skor soal no.3 : 20 Skor soal no.4 : 40 2. ketepatan dan kesesuaian jawaban <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	Tes Tertulis 2 X 50		<b>Materi:</b> semua materi yang telah diberikan <b>Pustaka:</b> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <b>Materi:</b> semua materi yang telah diberikan <b>Pustaka:</b> Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press. <b>Materi:</b> semua materi yang telah diberikan <b>Pustaka:</b> Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	14%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	50.85%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	7.51%
3.	Penilaian Portofolio	5.01%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	6.68%
5.	Tes	29%
		99.05%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 18 Desember 2024

Koordinator Program Studi D4  
Administrasi Negara



Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.  
NIDN 0023097908

UPM Program Studi D4 Administrasi  
Negara



Dr. Haryo Kunto Wibisono, S.AP.,  
M.AP.  
NIDN 0018048710



File PDF ini digenerate pada tanggal 22 Februari 2025 Jam 01:31 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa